

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN BUDAYA ORGANISASI
BERAKHLAK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH
DAERAH MELALUI MEDIASI KUALITAS
PELAPORAN KEUANGAN**



**Disertasi Oleh:
MAHDI HENDRICH
NIM
01013681924006**

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Doktor
Pada
Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi
Kekhususan Akuntansi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Disertasi : Pengaruh Akuntabilitas Dan Budaya Organisasi BerAKHLAK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Mediasi Kualitas Pelaporan Keuangan

Nama Mahasiswa : Mahdi Hendrich

NIM : 01013681924006

Program Studi : Doktor Ilmu Ekonomi

Kekhususan : Akuntansi Keuangan

Menyetujui,

Promotor,

Prof. Dr. Taufiq Marwa.,S.E.,M.Si.
NIP. 196812241993031002

Co Promotor 1,

Prof. Dr. Luk Luk Fuadah.,S.E.,M.B.A.,Ak.
NIP. 197405111999032001

Co Promotor 2,

Dr. Sa'adah Siddik.,S.E., M.Si., Ak.
NIP. 195509021987032001

Ketua Program Studi
Doktor Ilmu Ekonomi,

Prof. Dr. H. Didik Susetyo.,M.Si.
NIP. 196007101987031003

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Sriwijaya,



Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E
NIP. 196706241994021002

Tanggal Lulus : 10 Januari 2025



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI

Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km. 32 Indralaya (Ogan Ilir) Kode Pos 30662

Tel: (0711) 580964, 580646 Fax: (0711) 580964

Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139

Laman: <http://fe.unsri.ac.id> - email: dekanfe@unsri.ac.id

MATRIK PERBAIKAN UJIAN NASKAH DISERTASI

Nama : Mahdi Hendrich
NIM : 01013681924006
Program Studi : Doktor Ilmu Ekonomi
Kekhususan : Akuntansi Keuangan
Promotor : Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E.,M.Si (.....)
Co Promotor : 1. Prof. Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., M.B.A., Ak. (.....) *Luk*
2. Dr. Sa'adah Siddik, S.E., M.Si., Ak (.....) *Saadah*

No.	Dosen Penguji	Saran dan Masukan	Keterangan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Husaini, S.E., M.Si., Ak., CA., CRP	Buat Penjelasan pengaruh tidak langsung Akuntabilitas dan Budaya Organisasi BerAKHLAK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Variabel Kualitas Pelaporan Keuangan	Sudah di perbaiki pada halaman, 43 sampai dengan halaman 47.	<i>Husaini</i>
		Pada Bab III urutkan pengujian variabel Mediasi hingga keputusan hasil pengujian	Sudah di perbaiki pada halaman 65 sd halaman 68.	
		Hasil pengujian SEM-PLS di tempatkan terdahulu baru pengujian tambahan	Sudah di urutkan dan di perbaiki, halaman 93 sd halaman 117.	
		Jelaskan di dalam Impilkasi strategis penelitian tentang aspek dominan yang berkaitan dengan penelitian	Sudah di perbaiki pada halaman 140 sampai dengan halaman 142.	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km. 32 Inderalaya (Ogan Ilir) Kode Pos 30662

Tel: (0711) 580964, 580646 Fax:(0711) 580964

Jl. Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139

Laman: <http://fe.unsri.ac.id> – email : dekanfe@unsri.ac.id

2.	Dr. Ika Sasti Ferina.,S.E.,M.Si.,Ak	Tambahkan teori cara memperoleh data	Sudah di perbaiki pada halaman 55, 56, dan 57.	
		Implikasi hasil penelitian di tambahkan penjelasannya	Sudah di perbaiki pada halaman 133 sampai dengan halaman 142.	
3.	Dr. Hasni Yusrianti.,S.E.,M.A.A.C.,Ak	Tambahkan referensi pengujian mediasi	Sudah di perbaiki dan tambahkan, pada halaman 65 sd 68.	
		Tambahkan langkah perbaikan pemda yang jadi objek penelitian	Sudah di perbaiki pada halaman 133 sd 135 dan 140, 141.	
4.	Prof. Dr. Taufiq Marwa.,S.E.,M.Si.	Perbaiki sesuai saran dari penguji	Sudah di perbaiki sesuai yang di sarankan oleh penguji.	
5.	Prof. Dr. Luk Luk Fuadah.,S.E.,M.B.A.,Ak.	Perbaiki sesuai saran dari penguji	Sudah di perbaiki sesuai yang di sarankan oleh penguji.	
6.	Dr. Sa'adah Siddik.,S.E.,M.Si.,Ak.	Perbaiki sesuai saran dari penguji	Sudah di perbaiki sesuai yang di sarankan oleh penguji.	

Palembang, 13 Januari 2025

Ketua Program Studi

Doktor Ilmu Ekonomi,

Prof. H. Didik Susetyo, M.Si

NIP. 196007101987031003

*) paraf

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahdi Hendrich
NIM : 01013681924006
Jurusan : Doktor Ilmu Ekonomi
Bidang Kajian : Akuntansi Keuangan
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang berjudul:

“Pengaruh Akuntabilitas Dan Budaya Organisasi BerAKHLAK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Mediasi Kualitas Pelaporan Keuangan”

Pembimbing:

Promotor : Prof. Dr. Taufiq Marwa.,S.E.,M.Si.
Co. Promotor I : Prof. Dr. Luk Luk Fuadah.,S.E.,M.B.A.,Ak.
Co. Promotor II : Dr. Sa’adah Siddik.,S.E.,M.Si.,Ak.
Tanggal Ujian : 10 Januari 2025

Adalah benar hasil karya saya sendiri, dan di dalam Disertasi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Palembang, Januari 2025
Pembuat pernyataan,



Mahdi Hendrich
NIM. 01013681924006

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahdi Hendrich
NIM : 01013681924006
Jurusan : Doktor Ilmu Ekonomi
Kekhususan : Akuntansi Keuangan

Dengan ini menyatakan bahwa Disertasi saya berjudul "Pengaruh Akuntabilitas Dan Budaya Organisasi BerAKHLAK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Mediasi Kualitas Pelaporan Keuangan", **bebas dari plagiarism dan bukan hasil karya orang lain.**

Apabila di kemuadian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah tersebut terdapat indikasi plagiarism, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Januari 2025

Pembuat pernyataan,



Mahdi Hendrich
NIM. 01013681924006

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul "*Pengaruh Akuntabilitas dan Budaya Organisasi BerAKHLAK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Mediasi Kualitas Pelaporan Keuangan*" Penulisan disertasi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Ekonomi Kekhususan Akuntansi Keuangan pada Program Studi Ilmu Ekonomi di Universitas Sriwijaya.

Disertasi ini membahas bahwa akuntabilitas dan Budaya Organisasi *BerAKHLAK* memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Namun, peran mediasi kualitas pelaporan keuangan menjadi kunci untuk mengoptimalkan hubungan tersebut. Implikasi penelitian ini adalah perlunya pemerintah daerah untuk terus memperbaiki budaya kerja melalui penerapan nilai-nilai *BerAKHLAK*, meningkatkan transparansi dan tanggung jawab, serta memastikan kualitas pelaporan keuangan yang tinggi guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya Program Studi Ilmu Ekonomi Kekhususan Akuntansi Keuangan, serta bagi masyarakat luas.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian dan apresiasi yang diberikan terhadap karya ini.

Palembang, Januari 2025



Mahdi Hendrich
NIM. 01013681924006

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelesaian disertasi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taifiq Marwa.,S.E.,M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya dan sekaligus sebagai Ketua Promotor yang telah memberikan kesempatan, Fasilitas, Arahan, semangat dan masukan kepada penulis dalam penyusunan Disertasi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Luk Luk Fuadah.,S.E.,M.B.A.,Ak, selaku Co Promotor I yang telah memberikan arahan, membimbing dan masukan kepada penulis dalam penyusunan Disertasi ini.
3. Ibu Dr. Sa'adah Siddik.,S.E.,M.Si.,Ak, selaku Co Promotor II yang telah memberikan masukan dan arahan serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan Disertasi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Mohammad Adam.,S.E.,M.E, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan Disertasi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Didik Susetyo.,M.Si, selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan Disertasi ini.
6. Bapak Dr. Mukhlis.,S.E.,M.Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan saran, masukan dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian Disertasi ini.
7. Ibu Dr. Ika Sasti Ferina.,S.E.,M.Si.,Ak, Ibu Dr. Hasni Yusrianti.,S.E.,M.A.A.C.,Ak dan bapak Prof. Dr. Husaini.,S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CRP, selaku dosen pembahas dan penguji yang telah memberikan berbagai saran dan masukan yang membangun untuk penyempurnaan Disertasi ini.
8. Bapak Prof. Dr. Agoes Thony AK.,M.Si, selaku Rektor Universitas Sjakhyakirti yang telah memberikan izin belajar, motivasi dan bantuan pendanaan dan sebagainya untuk kelancaran dalam menyelesaikan studi ini.
9. Bapak Zein Ghozali.,S.E.,M.M.,M.Si.,Ak.,CA.,CSRS, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sjakhyakirti yang telah mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi ini.
10. Para Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan Perguruan Sjakhyakirti Palembang, yang telah mendukung dan memberikan izin belajar kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.
11. Bapak Prof. Dr. Iskhaq Iskandar.,M.Sc, selaku Kepala LLDIKTI Wilayah II Sumatera Selatan yang telah memberikan izin belajar kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.

12. Kepada kedua orang tuaku, H. Usman Yusuf (Alm) dan Hj. Sariana serta kedua mertuaku, H. Muzani Nawawi.,SIP dan Hj. Rosila A wani, yang selalu memberikan dukungan moril dan selalu berdoa untuk kelancaran penulis dalam menyelesaikan studi ini.
13. Istriku tercinta Desi Windayani.,S.E, yang selalu mendukung dan berdoa untuk kelancaran dalam menyelesaikan studi ini.
14. Anakku Aaqilah Desmanda Rizqullah, yang selalu mendukung dan berdoa untuk kelancaran dalam menyelesaikan studi ini.
15. Saudara kandungku, Ir. Asril Koto, Elviyanti.,A.Md, Musriyadi.,S.T, Heri Yuliardi.,S.E, Dahnia Apriyadi.,S.E.,dan Furqon Anjalis.,S.T. yang selalu mendukung dan berdoa untuk kelancaran dalam menyelesaikan studi ini.
16. Staf dosen pengajar Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dalam studi ini.
17. Mbak Komta Irawati.,S.Pd selaku staf administrasi Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi, yang selalu membantu dan memberikan informasi untuk kelancaran dalam penyelesaian studi ini.
18. Seluruh sivitas akademika Universitas Sjakhyakirti khususnya dosen dan staf administrasi Fakultas Ekonomi yang selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian studi ini.
19. Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan, khususnya bagian BPKAD yang telah membantu penulis dalam menjawab kuisisioner dan memberikan informasi untuk penyelesaian studi ini.
20. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi, Dr. Lisa Hermawati, Dr. Siti Khairani, Dr. Yuni Ekawarti, Dr. Maulan Irwadi, Dr (cand) Lia Sari, Dr (cand) Idham Kholid, terima kasih atas kebersamaan dan berbagi ilmu, informasi dan saling mensupport dalam penyelesaian studi ini.
21. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah dengan tulus dan ikhlas dalam mendukung demi kelancaran penyelesaian studi ini.

Semoga Disertasi ini memberikan manfaat bagi semua pihak terkait dengan pengambilan kebijakan, bagi lembaga pendidikan, pemerintah dan para praktisi serta kaum professional. Semoga Disertasi ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jairiah bagi penulis, Amin Ya Robbal Alamin.

Palembang, Januari 2025



Mahdi Hendrich
NIM. 01013681924006

ABSTRAK

Pengaruh Akuntabilitas Dan Budaya Organisasi BerAKHLAK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Mediasi Kualitas Pelaporan Keuangan

**Oleh:
Mahdi Hendrich**

Akuntabilitas dan Budaya Organisasi dapat berpengaruh terhadap baik buruknya Kinerja Pemerintah Daerah. Melalui mediasi kualitas pelaporan keuangan kedua variabel tersebut diduga dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini berupaya menganalisis pengaruh Akuntabilitas dan Budaya Organisasi “BerAKHLAK” terhadap Kinerja Pemerintah Daerah melalui mediasi Pelaporan Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Hasil penelitian menemukan bahwa Variabel Akuntabilitas memiliki pengaruh langsung, positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Variabel Budaya Organisasi BerAKHLAK memiliki pengaruh langsung, positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Variabel Kualitas Pelaporan Keuangan mampu memediasi pengaruh Budaya Organisasi BerAKHLAK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah namun tak mampu memediasi pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, serta Variabel Kualitas Pelaporan Keuangan memiliki pengaruh langsung, positif dan signifikan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Budaya Organisasi BerAKHLAK, Kinerja Pemerintah Daerah, Variabel Mediasi Kualitas Pelaporan Keuangan.

ABSTRACT

The Effect Of Accountability And Organizational Culture On Local Government Performance Through The Mediation Of Financial Reporting Quality

By:
Mahdi Hendrich

Accountability and Organizational Culture can affect the good or bad performance of the Regional Government. Through the mediation of the quality of financial reporting, both variables are thought to have a significant effect on the performance of the regional government. This study attempts to analyze the effect of Accountability and Organizational Culture called "BerAKHLAK" on Regional Government Performance through the mediation of Regional Financial Reporting in South Sumatra Province, Indonesia. The results of the study found that the Accountability variable has a direct, positive, and significant effect on Local Government Performance. The "BerAKHLAK" Organizational Culture variable also has a direct, positive, and significant effect on Local Government Performance. The Financial Reporting Quality variable is able to mediate the influence of the "BerAKHLAK" Organizational Culture on Local Government Performance but is unable to mediate the influence of Accountability on Local Government Performance. Additionally, the Financial Reporting Quality variable has a direct, positive, and significant effect.

Keywords: Accountability, Organizational Culture BerAKHLAK, Local Government Performance, The Mediation Of Financial Reporting Quality.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL -----	i
HALAMAN PENGESAHAN -----	ii
MATRIKS PERBAIKAN DESERTASI -----	iii
HALAMAN PERNYATAAN -----	v
PERYATAAN BEBAS PLAGIAT -----	vi
KATA PENGANTAR -----	vii
UCAPAN TERIMA KASIH -----	viii
ABSTRAK -----	x
ABSTRACT -----	xi
DAFTAR ISI -----	xii
DAFTAR TABEL -----	xvi
DAFTAR GAMBAR -----	xviii
DAFTAR LAMPIRAN -----	xix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian -----	1
1.2. Perumusan Masalah -----	19
1.3. Tujuan Penelitian -----	20
1.4. Manfaat Penelitian -----	20
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN -----	22
2.1. <i>New Public Management Theory</i>	22
2.2. Laporan Keuangan Daerah	24
2.3. Kualitas Pelaporan Keuangan	25
2.3.1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan -----	26
2.3.2. Indikator Pengukur Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah -----	26
2.4. Akuntabilitas -----	28
2.4.1. Pengertian Akuntabilitas -----	28
2.4.2. Indikator Akuntabilitas -----	29

2.5. Budaya Organisasi -----	31
2.5.1. Pengertian Budaya Organisasi -----	31
2.5.2. Karakteristik Budaya Organisasi -----	32
2.6. Budaya Organisasi BerAKHLAK -----	33
2.7. Kinerja Pemerintah Daerah -----	37
2.7.1. Definisi Kinerja -----	37
2.7.2. Indikator Kinerja Pemerintah -----	38
2.8. Penelitian Terdahulu -----	40
2.9. Alur Pikir -----	42
2.10. Hipotesis -----	47
2.11. Orisinalitas Penelitian -----	49
BAB III METODE PENELITIAN -----	51
3.1. Ruang Lingkup Penelitian -----	51
3.2. Populasi dan Sampel -----	51
3.2.1. Populasi -----	51
3.2.2. Sampel -----	52
3.3. Rancangan Penelitian -----	54
3.4. Jenis dan Sumber Data -----	55
3.5. Teknik Pengumpulan Data -----	56
3.5.1. Kuisisioner / Angket -----	56
3.5.2. Studi Kepustakaan -----	61
3.5.3. Observasi -----	61
3.6. Definisi Operasional Variabel -----	61
3.7. Teknis Analisis -----	65
3.7.1. Analisis SEM-PLS -----	65
3.7.1.1. Analisis Model Pengukuran (Outer Model) SEM-PLS	67
3.7.1.2. Analisis Model Struktural (Inner Model) SEM-PLS	67
3.7.2. Analisis Sobel Tes -----	67
3.8. Spesifikasi Model Penelitian -----	68

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
4.1. Hasil Penelitian	71
4.1.1. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Selatan	71
4.1.2. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	73
4.1.3. Profil Responden	78
4.1.4. Rekapitulasi Data Kuisisioner	81
4.1.4.1. Statistik Deskriptif Variabel Akuntabilitas	81
4.1.4.2. Rekapitulasi Data Variabel Akuntabilitas	82
4.1.4.3. Statistik Deskriptif Variabel Budaya Organisasi BerAKHLAK	83
4.1.4.4. Rekapitulasi Data Variabel Budaya Organisasi BerAKHLAK	85
4.1.4.5. Statistik Deskriptif Variabel Kualitas Pelaporan Keuangan	87
4.1.4.6. Rekapitulasi Data Variabel Kualitas Pelaporan Keuangan	88
4.1.4.7. Statistik Deskriptif Variabel Kinerja Pemerintah Daerah	90
4.1.4.8. Rekapitulasi Data Variabel Kinerja Pemerintah Daerah	91
4.2. Pembahasan	93
4.2.1. Perhitungan Analisis <i>Structural Equation Model-Partial Least Square (SEM-PLS)</i>	93
4.2.2.1. Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)	95
4.2.2.1.1. Uji Individual Item Reliability	97
4.2.2.1.2. Uji Internal Consistency Reability	101
4.2.2.1.3. Uji Avarage Variance Extracted (AVE) ----	102
4.2.2.1.4. Uji Discriminant Validity	102
4.2.2.2. Evaluasi Model Struktural (Inner Model)	104
4.2.2.2.1. Path Coefficient	106
4.2.2.2.2. Specific Indirect Effect	107

4.2.2.2.3. Coefficient of Determinant (R Square) ----	110
4.2.2.2.4. Effect Size (f square) -----	111
4.2.2. Perhitungan Sobel Test -----	112
4.2.2.1. Sobel Test Pengaruh AK → KPK → KPD -----	115
4.2.2.2. Sobel Test Pengaruh BOB → KPK → KPD -----	116
4.3. Pembahasan Permasalahan -----	117
4.3.1. Pengaruh Langsung Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah -----	117
4.3.2. Pengaruh Langsung Budaya Organisasi BerAKHLAK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah -----	121
4.3.3. Pengaruh Budaya Organisasi BerAKHLAK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Mediasi Kualitas Pelaporan Keuangan -----	124
4.3.4. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Mediasi Kualitas Pelaporan Keuangan -----	126
4.3.5. Pengaruh Langsung Kualitas Pelaporan Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah -----	127
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN -----	129
5.1. Kesimpulan -----	129
5.2. Keterbatasan dan Saran Penelitian -----	131
5.2.1. Keterbatasan -----	131
5.2.2. Saran -----	132
5.3. Implikasi Penelitian -----	133
5.3.1. Implikasi Praktis -----	133
5.3.2. Implikasi Teoritis -----	135
DAFTAR PUSTAKA -----	143
LAMPIRAN -----	148

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penilaian IPKD Kabupaten/Kota Sumsel 2021-2022-----	11
Tabel 2. Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 2010-2022-----	14
Tabel 3. Ringkasan Sampel Penelitian -----	53
Tabel 4. Rancangan Kuesioner Penelitian -----	57
Tabel 5. Definisi Operasional Variabel -----	62
Tabel 4.1. Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 -----	76
Tabel 4.2. Rincian Jumlah Kuisisioner -----	79
Tabel 4.3. Profil Responden -----	80
Tabel 4.4. Statistik Deskriptif Variabel Variabel Akuntabilitas -----	81
Tabel 4.5. Rakapitulasi Data Kuisisioner Variabel Akuntabilitas -----	82
Tabel 4.6. Statistik Deskriptif Variabel Budaya Organisasi BerAKHLAK -----	84
Tabel 4.7. Rekapitulasi Data Kuisisioner Variabel Budaya Organisasi BerAKHLAK -----	85
Tabel 4.8. Statistik Deskriptif Variabel Kualitas Pelaporan Keuangan -----	87
Tabel 4.9. Rekapitulasi Data Kuisisioner Variabel Kualitas Pelaporan Keuangan-----	88
Tabel 4.10. Statistik Deskriptif Variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah -----	90
Tabel 4.11. Rekapitulasi Data Kuisisioner Variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah-----	91
Tabel 4.12. Nilai Loading Factor (Perhitungan awal) -----	98
Tabel 4.13. Nilai <i>Loading Factor</i> (Perhitungan ulang) -----	100
Tabel 4.14. Hasil Perhitungan <i>Cronbach's Alpha</i> , <i>Composite Reliability</i> , dan <i>Average Variance Extracted (AVE)</i> -----	101
Tabel 4.15. Hasil Uji HTMT -----	103
Tabel 4.16. Hasil Uji <i>Fornell-Larcker criterion</i> -----	103
Tabel 4.17. Hasil Perhitungan <i>Path Coefficient</i> -----	106
Tabel 4.18. <i>Specific Indirect Effect</i> -----	108

Tabel 4.19. Perhitungan Nilai R Square -----	107
Tabel 4.20. Nilai F Square -----	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Alur Pikir-----	42
Gambar 2.2 Hubungan Mediasi-----	44
Gambar 2.3. Langkah dan Prosedur Analisis Mediasi Pada SEM-PLS -----	46
Gambar 3.1. Spesifikasi Model -----	69
Gambar 4.1. Peta Administrasi Provinsi Sumatera Selatan -----	71
Gambar 4.2. Model Penelitian -----	94
Gambar 4.3. <i>Outer</i> dan <i>Inner</i> Model Penelitian -----	95
Gambar 4.4. Hasil Pengujian <i>Outer Model</i> (Perhitungan Awal) -----	96
Gambar 4.5. Pengujian <i>Outer Model</i> (Perhitungan Ulang) -----	99
Gambar 4.6. Pengujian <i>Inner Model</i> -----	105
Gambar 4.7. Model Penelitian Setelah Analisis SEM-PLS -----	112
Gambar 4.8. Hubungan Mediasi -----	113
Gambar 4.9. Mediasi Penelitian (Sobel Test) -----	114

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:	1	Persetujuan publikasi jurnal -----	138
Lampiran:	2	Formulir konsultasi artikel -----	139
Lampiran:	3	Permohonan mengikuti ujian naskah Disertasi -----	142
Lampiran:	4	Persetujuan ujian naskah Disertasi -----	143
Lampiran:	5	Matrik Perbaikan ujian naskah Disertasi -----	144
Lampiran:	6	Persetujuan ujian kolakium II -----	146
Lampiran:	7	Matrik perbaikan ujian kolakium II -----	147
Lampiran:	8	Agenda konsultasi Disertasi (kolakium II) -----	149
Lampiran:	9	Persetujuan ujian Proposal Disertasi -----	152
Lampiran:	10	Matrik perbaikan Proposal Disertasi -----	153
Lampiran:	11	Agenda konsultasi Proposal Disertasi -----	156
Lampiran:	12	Permohonan mengikuti ujian kolakium I -----	159
Lampiran:	13	Persetujuan ujian kolakium I -----	160
Lampiran:	14	Agenda konsultasi kolakium I -----	161
Lampiran:	15	Daftar mengikuti ujian program doktoral -----	167
Lampiran:	16	Rincian jumlah kuisisioner -----	169
Lampiran:	17	Profil responden -----	170
Lampiran:	18	Statistik deskriptif dan rekapitulasi data kuisisioner variabel akuntabilitas -----	171
Lampiran:	19	Statistik deskriptif dan rekapitulasi data kuisisioner variabel budaya organisasi BerAKHLAK -----	172
Lampiran:	20	Statistik deskriptif dan rekapitulasi data kuisisioner variabel kualitas pelaporan keuangan -----	173
Lampiran:	21	Statistik deskriptif dan rekapitulasi data kuisisioner variabel kinerja pemerintah daerah -----	174
Lampiran:	22	Rekapitulasi data kuisisioner -----	175
Lampiran:	23	Analisis SEM-PLS -----	187
Lampiran:	24	Regresi sobel test -----	195
Lampiran:	25	Surat permohonan penelitian ke Kesbangpol Provinsi Sumsel ----	197
Lampiran:	26	Surat pengantar penelitian dari Kesbangpol Provinsi Sumsel ----	198
Lampiran:	27	Surat izin peneitian dari Kaprodi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya -----	199
Lampiran:	28	Kuisisioner penelitian -----	216
Lampiran:	29	Poto dokumentasi penyebaran kuisisioner penelitian pada 17 kabupaten / kota Provinsi Sumsel -----	221

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak diterapkannya otonomi daerah di Indonesia pada tahun 2001 melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (yang kemudian direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014), kondisi pemerintahan daerah mengalami berbagai perubahan signifikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa aspek penting terkait kondisi pemerintahan daerah pasca penerapan otonomi daerah adalah terciptanya peningkatan kewenangan dan tanggung jawab daerah yang membawa efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan daerah, munculnya inovasi dan reformasi dalam pengelolaan aset-aset daerah, serta adanya peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan daerahnya. Penerapan otonomi daerah memiliki tujuan akhir yaitu

mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah agar tercipta kesejahteraan yang merata di setiap wilayah kabupaten dan kota.

Sumatera Selatan adalah provinsi yang dipilih dalam penelitian ini untuk diteliti kinerja pemerintahannya. Alasan pemilihan Sumatera Selatan sebagai objek yang diteliti adalah dikarenakan Sumatera Selatan adalah provinsi terbesar ketiga di Pulau Sumatera berdasarkan luas wilayah. Berdasarkan luas wilayahnya yang mencapai sekitar 91.592,43 km², Sumatera Selatan menempati peringkat ke-10 sebagai provinsi terbesar di Indonesia. Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran penting dalam ekonomi dan infrastruktur di Pulau Sumatera, dikenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah serta disebut sebagai "Lumbung Energi" Indonesia karena memiliki cadangan sumber energi melimpah misalnya batu bara, minyak bumi, gas alam, dan potensi energi terbarukan lainnya. Pemerintah-pemerintah daerah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebanyak 17 kabupaten dan kota menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Menurut Badan Pusat Statistik (2024), Provinsi Sumatera Selatan memiliki kinerja perekonomian yang cukup baik. Tercatat perekonomian Sumatera Selatan tumbuh 5,08% dan berada di atas nasional sebesar 4,94% selama tahun 2023. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumsel berada pada angka 73,18 poin atau masuk dalam kategori tinggi. Angka itu naik 0,97 poin dibandingkan 2022. Namun, angka itu masih di bawah nasional yang mencapai 74,39 poin. Angka pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan juga tercatat turun selama tahun 2023. Data-data tersebut sering digunakan untuk menilai kinerja

pemerintahan daerah dan data tersebut dapat disimpulkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan memiliki kinerja pemerintahan yang cukup baik.

Kinerja pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi publik yaitu pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah diukur dari berbagai aspek, antara lain: (1) Masukan (*input*) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran; (2) Proses (*process*): ukuran kegiatan baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut; (3) Keluaran (*output*): sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*); (4) Manfaat (*benefit*): keuntungan atau nilai yang diperoleh dari hasil suatu kegiatan; (5) Dampak (*impact*): pengaruh dari suatu kegiatan terhadap masyarakat, baik secara positif maupun negatif (Mahsun, 2020).

Kinerja pemerintah daerah merupakan hasil kerja pemerintah suatu wilayah provinsi, kabupaten atau kota dalam menjalankan tugas pembangunan untuk memenuhi kebutuhan serta menciptakan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dapat meliputi berbagai aspek seperti pengelolaan keuangan, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi, pengelolaan lingkungan, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Rahayu, et al (2023) pengukuran kinerja pemerintah sangat penting untuk menilai pencapaian sasaran dan pelayanan publik, salah satunya diukur dari

perspektif kondisi keuangan. Untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah tentu perlu ditetapkan indikator-indikator tertentu dalam penilaian tersebut. Tran et al (2021) mengemukakan beberapa indikator-indikator kinerja pemerintahan antara lain adalah: (1) Kuantitas atau jumlah hasil kerja; (2) Kualitas hasil kerja; (3) Banyaknya inovasi atau ide baru yang dilakukan; (4) Reputasi pada keunggulan kerja; (5) Efisiensi operasional; (6) Moral personal.

Pemerintah pusat juga telah menyusun rumusan indikator kinerja pemerintah daerah salah satunya adalah melalui Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang dituangkan pada Permendagri No. 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Daerah. Menurut aturan Permendagri No. 19 Tahun 2020, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan satuan ukuran kinerja pemerintah yang lebih terukur dan objektif. Hal tersebut dikarenakan pengukuran kinerja tidak terfokus pada satu hal saja namun ada beberapa faktor di dalamnya, yaitu: (1) kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; (2) pengalokasian anggaran belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); (3) transparansi pengelolaan keuangan daerah; (4) penyerapan anggaran; (5) kondisi keuangan daerah; (6) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pengukuran IPKD ini akan menghasilkan pemilahan kategori penilaian terhadap pengelolaan keuangan daerah masing-masing. Terdapat tiga kategori daerah berdasarkan nilai IPKD yaitu: (1) daerah dengan kategori “Baik; (2) daerah dengan kategori “Perlu Perbaikan”; (2) daerah dengan kategori “Sangat Perlu Perbaikan” (Khoirunnisa & Siswanto, 2023).

Kinerja pemerintah daerah memiliki hubungan yang erat dengan akuntabilitas. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pratolo (2008) penerapan akuntabilitas sangat mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan karena untuk pertanggung jawaban akan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dasar pemerintahan yang baik (*good governance*). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilakukan.

Menurut Mardiasmo (2020), Akuntabilitas publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*principal*). Akuntabilitas adalah kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada para pemangku kepentingan.

Indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah: akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kejujuran dan hukum terkait dengan pengelolaan yang menghindari penyalahgunaan serta mematuhi aturan hukum yang berlaku. Akuntabilitas proses terkait dengan proses pelaksanaan apakah sesuai dengan standar prosedur akuntansi yang ditetapkan serta kecukupan sistem informasi akuntansi yang memadai. Akuntabilitas program terkait dengan efektivitas ketercapaian program. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggung jawaban kepada masyarakat (Mardiasmo, 2020).

Selain akuntabilitas, budaya organisasi juga menjadi faktor yang menunjang terciptanya kinerja pemerintahan daerah yang baik. Menurut Edy (2019), budaya

organisasi dapat didefinisikan sebagai perangkat sistem nilai-nilai (values), keyakinan-keyakinan (beliefs), asumsi-asumsi (assumptions), atau norma-norma yang telah lama berlaku disepakati dan diikuti oleh para anggota-anggota sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasinya. Menurut Sulaksono (2019), budaya organisasi adalah nilai-nilai yang menjadi pegangan sumber daya manusia dalam menjalankan kewajiban dan perilakunya di dalam organisasi. Dengan demikian, budaya organisasi yang terbentuk akan menjadi pola sikap, perilaku dan sistem kerja yang melandasi arah sebuah organisasi. Semakin baik dan positif budaya organisasi maka akan semakin memperkuat organisasi dalam mewujudkan kinerja yang baik.

Budaya organisasi biasanya diterjemahkan dalam rumusan budaya kerja pada sebuah organisasi. Rumusan budaya kerja dan organisasi di lingkungan organisasi pemerintah daerah telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu rumusan “*Core Value ASN*”. *Core Values ASN* adalah nilai-nilai dasar ASN yang sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. *Core Values ASN* bertujuan untuk memperkuat budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN (Aparatur Sipil Negara) yang profesional.

Rumusan *Core Value ASN* tersebut kemudian dituangkan menjadi menjadi beberapa poin nilai yang menjadi landasan budaya kerja dan organisasi di lingkungan aparatur pemerintahan. Poin-poin tersebut antara lain adalah Berorientasi layanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Poin-poin nilai tersebut kemudian disingkat menjadi “BerAKHLAK” Budaya organisasi BerAKHLAK diluncurkan oleh pemerintah pusat pada 27 Juli

2021. Berdasarkan Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2020, setiap instansi pemerintah di pusat dan daerah perlu menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK. BerAKHLAK merupakan faktor penting dalam penguatan Reformasi Birokrasi. Budaya kerja ini akan mendorong transformasi sistem kerja organisasi dan manajemen kinerja ASN yang berorientasi pada output dan outcome. Penerapan budaya organisasi berAKHLAK ini diharapkan mampu berpengaruh positif dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini mencoba menganalisis hubungan dan pengaruh akuntabilitas serta budaya organisasi dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang baik. Beberapa kajian penelitian terdahulu menemukan bahwa variabel akuntabilitas dan budaya organisasi memiliki pengaruh tak langsung terhadap kinerja pemerintahan daerah. Dengan demikian artinya akuntabilitas dan budaya organisasi akan efektif berpengaruh terhadap kinerja melalui variabel lain memiliki efek langsung dalam mengubah kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, model penelitian yang akan dibangun membutuhkan satu variabel mediasi yaitu Kualitas Pelaporan Keuangan.

Menurut Safkaur et al (2019) laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Meningkatnya tuntutan terhadap penerapan akuntabilitas publik, mempunyai implikasi bagi manajemen di instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, salah satunya adalah informasi tentang laporan keuangan. Fungsi informasi di laporan keuangan tidak akan mempunyai manfaat jika

penyajian dan penyampaian informasi keuangan tidak dapat diandalkan dan tidak tepat waktu.

Kualitas pelaporan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik. Kualitas laporan keuangan mencerminkan kesesuaian informasi keuangan yang disajikan suatu entitas dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang berkualitas baik menunjukkan bahwa informasi yang terkandung di dalamnya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Kualitas pelaporan keuangan tidak sekedar mencatat angka, namun juga mencerminkan transparansi, akuntabilitas dan integritas organisasi. Kualitas pelaporan keuangan juga berdampak pada kinerja aktivitas organisasi (Saputra et al., 2024).

Terdapat empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Keempat karakteristik tersebut dijelaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu: Andal, Relevan, Dapat dipahami, dan Dapat dibandingkan. Laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi keempat karakteristik tersebut (KSAP, 2022)

Permendagri No. 64 Tahun 2013 telah menetapkan tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah. Penerapan akuntansi berbasis akrual menghasilkan 7 laporan keuangan pokok, yakni Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran (SAL), Laporan Arus Kas (LAK), Catatan Atas

Laporan Keuangan (CaLK), dan Laporan Perubahan Ekuitas/LPE (Putra dan Varina, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menetapkan bahwa Laporan Keuangan pemerintah pada gilirannya harus diaudit oleh BPK. Tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah melaksanakan pemeriksaan keuangan, kemudian hasil dari pemeriksaan BPK akan dikeluarkan pendapat atau opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas pemeriksaan laporan keuangan (Rante et al., 2018). Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mendefinisikan opini sebagai pernyataan profesional yang merupakan kesimpulan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. UU tersebut juga menyebutkan jenis-jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian/WTP (*unqualified opinion*), opini Wajar Dengan Pengecualian/WDP (*qualified opinion*), opini Tidak Wajar/TW (*adverse*), dan pernyataan menolak atau tidak memberikan pendapat/TMP (*disclaimer*) (Umaryadi, 2015).

Opini WTP menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAP). Opini WDP menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo

anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan yaitu penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) dan adanya pembatasan lingkup atau ketidakcukupan bukti. Opini TW adalah ketika Pemeriksa, setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun *agregat*, adalah material dan *pervasive*. Sifat *pervasive* (berpengaruh secara keseluruhan) diantaranya dapat dilihat dari kompleksitas, proporsinya terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, dan persyaratan pengungkapan yang bersifat fundamental. Sementara kondisi yang menyebabkan Pemeriksa menyatakan opini TMP adalah adanya pembatasan lingkup yang luar biasa sehingga Pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup memadai sebagai dasar menyatakan pendapat atau opini (BPK RI, 2020).

Setelah menguraikan variabel-variabel penelitian yang akan digunakan, maka selanjutnya akan dibahas bagaimana kondisi variabel-variabel tersebut pada objek penelitian yang kita amati yaitu Provinsi Sumatera Selatan. Beberapa data dan fakta didapati terkait kinerja pemerintah, pelaksanaan akuntabilitas keuangan, penerapan budaya organisasi BerAKHLAK, serta bagaimana pelaporan keuangan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan data awal yang telah dikemukakan oleh BPS sebelumnya dinyatakan bahwa Provinsi Sumatera Selatan memiliki kinerja perekonomian yang cukup baik. Namun jika mengacu pada perhitungan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang merupakan acuan pemerintah daerah dalam

menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah, maka masih banyak terdapat kelemahan pengelolaan keuangan di Sumatera Selatan khususnya dinilai dari pengelolaan keuangan seluruh kabupaten dan kota. Nilai IPKD di Sumatera Selatan pada berbagai kabupaten dan kota masih banyak yang masuk dalam kategori “Perlu Perbaikan” dan “Sangat Perlu Perbaikan” untuk pengelolaan keuangan daerahnya. Tabel berikut ini menggambarkan penilaian IPKD di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021-2022.

Tabel 1
Penilaian IPKD Kabupaten/Kota Sumsel 2021-2022

Kab/Kota.	PENILAIAN IPKD			
	2021		2022	
	Indeks Total	Kategori	Indeks Total	Kategori
OKU	52.11	Sangat Perlu Perbaikan	80.55	Baik
OKI	69.66	Perlu Perbaikan	73.31	Perlu Perbaikan
Muara Enim	77.08	Perlu Perbaikan	73.96	Perlu Perbaikan
Lahat	57.67	Perlu Perbaikan	74.17	Perlu Perbaikan
Musi Rawas	59.56	Perlu Perbaikan	78.54	Baik
Musi Banyuasin	64.38	Perlu Perbaikan	68.92	Perlu Perbaikan
Banyuasin	54.51	Perlu Perbaikan	71.78	Perlu Perbaikan
OKU Timur	69,92	Perlu Perbaikan	78.80	Baik
OKU Selatan	66,06	Perlu Perbaikan	73.11	Perlu Perbaikan
Ogan Ilir	72,15	Perlu Perbaikan	73.62	Perlu Perbaikan
Empat Lawang	57,83	Perlu Perbaikan	75.57	Perlu Perbaikan
Penukal Abab Lematang Ilir	50,06	Perlu Perbaikan	51.21	Sangat Perlu Perbaikan
Muratara	69,23	Perlu Perbaikan	75.76	Perlu Perbaikan
Palembang	65,61	Perlu Perbaikan	73.44	Perlu Perbaikan
Pagar Alam	57,89	Perlu Perbaikan	55.46	Sangat Perlu Perbaikan
Lubuk Linggau	44,46	Sangat Perlu Perbaikan	65.69	Perlu Perbaikan
Prabumulih	46,82	Sangat Perlu Perbaikan	59.58	Perlu Perbaikan

Sumber: <https://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/> , 2024

Pada Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2021 hampir seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan mendapatkan kategori IPKD “Perlu Perbaikan, sedangkan sisanya mendapatkan kategori “Sangat Perlu Perbaikan”. Demikian juga sama yang terjadi pada tahun 2022, hanya saja sudah ada tiga kabupaten yang mendapat kategori IPKD “Baik” yaitu Kabupaten OKU, Musi Rawas dan OKU Timur. Sementara sebagian besar daerah masih berkategori “Perlu Perbaikan” dan sisanya berkategori “Sangat Perlu Perbaikan”. Kondisi ini juga menggambarkan bahwa masih banyak kabupaten dan kota di Sumatera Selatan yang mendapatkan hasil yang belum optimal dalam pengelolaan keuangan daerah serta masih terdapat kelemahan dalam hal pencapaian ideal pada pemenuhan indikator-indikator pengelolaan keuangan daerah yang dituangkan dalam IPKD.

Sementara itu terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan, fenomena yang menjadi sorotan adalah masih ditemui kasus-kasus korupsi yang melibatkan oknum-oknum pejabat di lingkungan pemerintahan daerah di Sumatera Selatan menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam akuntabilitas pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Sumatera Selatan. Berdasarkan data indeks pencegahan korupsi yang dikembangkan KPK yaitu MCP (*Monitoring Centre of Prevention*), data menunjukkan rata-rata indeks MCP Sumsel pada tahun 2022 adalah sebesar 74 dan lebih rendah dari rata-rata nasional yang sebesar 76 (<https://kpk.go.id/>) Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kinerja pencegahan korupsi di Sumatera Selatan lebih rendah dari rata-rata nasional. Rendahnya rata-rata Indeks MCP Sumatera Selatan disebabkan rendahnya indeks MCP yang

diperoleh oleh 9 kabupaten/kota dibandingkan rata-rata nasional. Fenomena ini merupakan indikasi bahwa masih terdapat celah kelemahan pada akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Sumatera Selatan. Masih terdapat oknum-oknum pejabat pemerintahan daerah yang tidak mengedepankan sikap kejujuran, amanah dan ketaatan pada hukum.

Dari sisi penerapan budaya organisasi BerAKHLAK dapat diamati dari hasil survei Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). KemenPANRB mengungkapkan, di tahun 2022 telah dilakukan Survei Indeks BerAKHLAK yang hasilnya dijadikan *baseline* pengukuran di tahun 2023. Hasil survei menunjukkan rata-rata indeks implementasi ASN BerAKHLAK di 442 instansi pemerintah yang memenuhi syarat minimum responden adalah 60,9 persen atau di kategori B yaitu Cukup Sehat. Namun nilai Adaptif masih menjadi catatan bersama karena hampir di seluruh instansi pemerintah nilainya masih merah atau nilainya masih di bawah 50 (<https://www.menpan.go.id/>). Nilai-nilai ini juga termasuk penilaian bagi Provinsi Sumatera Saelatan. Catatan ini menunjukkan masih belum optimalnya penerapan budaya organisasi BerAKHLAK sehingga masih berdampak pada munculnya celah kelemahan kinerja pemerintah. Sementara dari sisi kualitas pelaporan keuangan daerah, opini BPK dalam pemeriksaan laporan keuangan daerah masih menjadi acuan utama penilaian baik tidaknya pelaporan keuangan Provinsi Sumatera Selatan disampaikan. Tabel berikut ini menunjukkan opini yang diberikan BPK pada setiap hasil pemeriksaan atas laporan keuangan daerah yang dilaporkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2**Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah****Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 2010-2022**

NO	PEMERINTAH DAERAH	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pemerintah Prov. Sumsel	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Pemerintah Kab. Lahat	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
4	Pemerintah Kab. Maura Enim	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Pemerintah Kota Palembang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
8	Pemerintah Kota Pagaralam	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
9	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Pemerintah Kota Prabumulih	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Pemerintah Kab. Banyuasin	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Pemerintah Kab. Ogan Ilir	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
13	Pemerintah Kab. OKU Timur	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Pemerintah Kab. OKU Selatan	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara	-	-	-	-	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Pemerintah Kab. Musi Rawas	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17	Pemerintah Kab. PALI	-	-	-	-	TMP	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
18	Pemerintah Kab. Empat Lawang	WDP	WDP	TMP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: sumsel.bpk.go.id, 2024

Berdasarkan tabel 2 terlihat paling tidak selama 7 tahun terakhir yaitu sejak 2016-2022, hampir semua Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan opini terbaik dari BPK pada penilaian laporan keuangan daerahnya yaitu “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP). Hanya ada 2 kabupaten selama periode tersebut mendapatkan opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP) yaitu Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2016 serta Kabupaten PALI pada tahun 2017 dan 2020, dan Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021. Sementara untuk tahun 2022 yang mendapat opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP) yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Pagaram dan Kota Palembang.

Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh hampir seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan selama periode 2016-2022 merupakan salah satu fenomena yang diamati dalam penelitian ini. Melalui fenomena tersebut secara umum memberikan penilaian langsung yang menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan telah dinilai baik dan sangat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan. Namun, apabila dihubungkan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah di Sumatera Selatan, opini WTP tersebut belum cukup menggambarkan progres pembangunan yang ideal di beberapa wilayah kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Beberapa kabupaten/kota belum menunjukkan pesatnya perkembangan pembangunan yang dapat dinilai dari pertumbuhan ekonomi, penyediaan fasilitas publik, peningkatan kualitas hidup sumber daya manusianya serta kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan fakta

ini, dapat diduga walaupun mendapat opini WTP, namun pada beberapa kabupaten/kota tampaknya efektivitas dan efisiensi pengalokasian belanja publik belum tepat sasaran dan belum ideal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga tujuan pembangunan belum tercapai secara ideal.

Melalui penilaian kualitas pelaporan keuangan yang baik, seharusnya pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Selatan mampu merumuskan kebijakan yang pembangunan yang efektif sehingga pengalokasian belanja daerah untuk mendorong pelaksanaan kebijakan itu juga tepat sasaran. Beberapa fakta lapangan menunjukkan bahwa terdapat kabupaten dan kota di Sumatera Selatan yang mengalokasikan belanja daerahnya kepada proyek-proyek pembangunan yang bukan merupakan prioritas bagi kebutuhan masyarakat bahkan terkadang proyek pembangunan tersebut hanya mendatangkan pemborosan keuangan saja.

Beberapa penelitian terdahulu menjadi acuan untuk mengembangkan penelitian ini. Penelitian-penelitian yang menganalisis pengaruh langsung kualitas pelaporan keuangan terhadap kinerja organisasi baik publik maupun privat. Penelitian-Penelitian itu antara lain penelitian Sohail dan Aziz (2019), Pakpahan (2020), Ogbonnaya dan Basil (2019), Babatunde dan Adeniyi (2019), Yunia dan Muttaqin (2022) Palembang et al (2022). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Hal ini dikarenakan kualitas pelaporan keuangan dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada pemangku kepentingan, sehingga dapat membantu mereka dalam pengambilan keputusan.

Terkait hubungan antara akuntabilitas terhadap kualitas pelaporan keuangan, beberapa penelitian telah menganalisisnya. Penelitian-penelitian tersebut antara lain penelitian Subaeti (2018), Fikrian (2015), Handayani (2019), Ridzal (2020), Wiguna et al (2021), dan Kholifaturrohmah et al (2023). Hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Beberapa penelitian mencoba menganalisis hubungan antara budaya organisasi terhadap kinerja sektor publik dan akuntabilitas yaitu antara lain penelitian Thi Tran et al (2021), yang meneliti tentang budaya kerja yang berorientasi pada hasil berpengaruh positif kinerja sektor publik melalui mediasi akuntabilitas. Sementara penelitian milik Savić et al (2023) juga menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja keuangan instansi/perusahaan namun menghasilkan kesimpulan yang berbeda yaitu bahwa tidak terlihat indikasi adanya pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja keuangan instansi/perusahaan.

Penelitian lain mencoba menganalisis hubungan antara budaya organisasi terhadap kualitas pelaporan keuangan yaitu penelitian Inah et al. (2014), Kuraesin et al. (2022), Azwari et al., (2023), Ufuoma & Nwasom, (2023). Penelitian tersebut mencapai kesimpulan bahwa budaya organisasi dapat mempengaruhi tingkat kualitas pelaporan keuangan. Semakin positif budaya organisasi yang berkembang di sebuah instansi/perusahaan maka pelaporan keuangan semakin baik.

Penelitian ini berupaya melakukan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan menggunakan variasi variabel mediasi serta memperluas

ruang lingkup objek penelitian dan cakupan data yang lebih banyak. Pada penelitian-penelitian sebelumnya, objek sektor publik yang diamati terbatas hanya pada sedikit instansi pemerintahan (dinas) yang sifatnya masih berada di bawah pemerintah kota, kabupaten, atau provinsi. Penelitian ini berusaha meneliti pemerintah kota atau kabupaten langsung di Provinsi Sumatera Selatan yang jumlah adalah 17 kabupaten dan kota. Beberapa penelitian sejenis yang terdahulu belum pernah menggunakan objek seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota provinsi untuk diteliti bagaimana pengaruh Budaya Organisasi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah melalui mediasi Kualitas Pelaporan Keuangan.

Novelty utama dalam penelitian ini adalah penggunaan indikator-indikator variabel yang merupakan pengembangan dan modifikasi yang dilakukan peneliti dengan mengacu pada indikator-indikator dasar yang di kemukakan teori. Terdapat beberapa penambahan indikator-indikator baru pada setiap variabel yang dibahas pada penelitian ini.

Pembahasan tentang variabel Kinerja Pemerintah Daerah dalam penelitian ini sangat penting dilakukan dikarenakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pencapaian hasil kerja pembangunan yang diperoleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya lebih rinci pada 17 Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di dalamnya. Sementara variabel Akuntabilitas dan Budaya Organisasi BerAKHLAK diperlukan untuk ditempatkan sebagai variabel yang menjelaskan Kinerja Pemerintah Daerah tersebut. Variabel Kualitas Pelaporan Keuangan dijadikan variabel mediasi

dengan pertimbangan dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa Akuntabilitas dan Budaya Organisasi memiliki pengaruh tak langsung terhadap Kinerja Pemerintah Daerah sehingga membutuhkan variabel lain sebagai mediasi. Selain itu, beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa variabel Akuntabilitas dan Budaya Organisasi memiliki pengaruh yang langsung terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan, sedangkan Kualitas Pelaporan Keuangan sendiri memiliki pengaruh langsung dalam mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan kajian penelitian dan riset terdahulu. Dengan dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Kualitas Pelaporan Keuangan dipilih menjadi variabel mediasi pada penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti menentukan untuk menyusun penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas dan Budaya Organisasi BerAKHLAK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Mediasi Kualitas Pelaporan Keuangan”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang diangkat adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh langsung Akuntabilitas dan Budaya Organisasi BerAKHLAK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah?
2. Bagaimanakah pengaruh langsung Kualitas Pelaporan Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah?

3. Bagaimanakah pengaruh tak langsung Akuntabilitas dan Budaya Organisasi BerAKHLAK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah melalui mediasi variabel Kualitas Pelaporan Keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji pengaruh langsung Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Untuk menguji pengaruh langsung Budaya Organisasi BerAKHLAK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
3. Untuk menguji pengaruh tak langsung Akuntabilitas dan Budaya Organisasi BerAKHLAK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui mediasi variabel Kualitas Pelaporan Keuangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi perkembangan ilmu ekonomi maupun bagi pengambil kebijakan. Manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis.

Penelitian ini mencoba memperluas pemahaman tentang akuntabilitas publik dan kinerja sektor publik. Penelitian menggunakan *New Public Manajemen (NPM) Theory* sebagai teori utama. Melalui analisis teori ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi tentang pengaruh langsung

Akuntabilitas dan Budaya Organisasi BerAKHLAK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta pengaruh tak lansungnya melalui mediasi variabel Kualitas Pelaporan Keuangan.

2. Manfaat Praktis.

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan agar dalam upaya peningkatan kinerja dapat memperhatikan kualitas pelaporan keuangan serta peningkatan akuntabilitas pemerintah dan efektivitas penerapan budaya organisasi BerAKHLAK
- b. Penelitian dapat sebagai referensi bagi pemerintah, masyarakat dalam menilai dan memberikan saran atau masukan untuk pengembangan kinerja, akuntabilitas, kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, serta penerapan budaya organisasi BerAKHLAK.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwari, P. C., Barkah, Q., Nuraliati, A., Taufik, A., Rizki, M., & Mulyani, N. (2023). *Organizational Culture, Financial Reporting Quality, And Good Governance: Evidence From Islamic Financial Institutions*. 7(3), 131–143. <https://doi.org/10.22495/cgobrv7i3p11>
- Babatunde, A. A., & Adeniyi, A. (2019). The Effect of Financial Reporting Quality on Corporate Performance in Nigeria. In *Sumerianz Journal of Economics and Finance* (Vol. 2, Issue 12).
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Provinsi Sumatera Selatan dalam Angka 2024*.
- Bahri, S. (2021). *Pengantar Akuntansi* (C. Pertama (ed.)). CV. Andi Offset.
- Bastian, I. (2020). *Analisis Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. CV. Andi Offset.
- BKN. (2022). Buku Saku Panduan Perilaku Core Values. In *Badan Kepegawaian Negara*. Badan Kepegawaian Negara.
- BPK RI. (2020). *Juknis Pemeriksaan LKPD*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Edy, S. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (11th ed.). Prananda Media Group.
- Ferdous, J. (2016). The Journey Of New Public Management: An Analysis. *International Journal of Business, Economics and Law*, 11(2), 1–6.
- Fikrian, H. (2015). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 34045.
- Garson, G. D. (2020). *Partial Least Squares. Regression and Structural Equation Models-Statistical Publishing Associates*. <https://doi.org/1626380392>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 (X)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Kusumadewi, K. A. (2023). *Partial Least Squares Konsep Teknik dan Aplikasi dengan Program Smart PLS 4.0*. Universitas Diponegoro.
- Gorontalo, P., Ibrahim, G., Blongkod, H., & Rasjid, H. (2024). *SEIKO : Journal of Management & Business Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Desa-Desa Di Kabupaten Boalemo ,. 7(2), 951–976*.
- Hair, Jr., J. F., M. Hult, G. T., M. Ringle, C., Sarstedt, & Marko. (2022). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* [3 ed]. In *Sage Publishing* (Vol. 3, Issue 1).
- Handayani, P. T. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris BPKAD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015). *JURNAL MAHASISWA MAGISTER AKUNTANSI*,4(4). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/maksi/article/view/34730>

- Hariani, S., & Fakhrorazi, A. (2021). Determinants of Financial Reporting Quality: An Empirical Study Among Local Governments In Indonesia. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE STUDIES*, 13(1), 2021. <https://doi.org/10.34109/ijefs>
- Herwiyanti, E., Sukirman, S., & Sufi Aziz, F. (2017). Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 19(1), 13–23. <https://doi.org/10.9744/jak.19.1.13-23>
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian* (1st ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
- Hood, C. (1991). A Public Management for All Seasons? *Public Administration*, 69(1), Public Adm.
- Inah, E. U., Tapang, A. T., & Uket, E. E. (2014). *Organizational Culture and Financial Reporting Practices in*. 5(13), 190–199.
- Indahsari, C. L., & Raharja, S. J. (2020). New Public Management (NPM) as an Effort in Governance. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 3(2), 73–81.
- Isa, I. G. T., & Hadiana, A. (2020). Implementasi Kansei Engineering dalam Perancangan Desain Interface E-Learning Berbasis web (Studi Kasus: SMK Negeri 1 Sukabumi). *Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 3(April), 104–115.
- Kholifaturrohmah, R., Mulasiwi, M., & Floresti, D. A. (2023). The Quality Of Financial Reporting On The Accountability Of Public Organizations: A Literature Review. *Midyear International Conference*, 310–316.
- KSAP. (2022). Standar Akuntansi Pemerintahan. In *Komite Standar Akuntansi Pemerintahan* (Issue 71). <https://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2021/07/Buku-SAP-2021-1.pdf>
- Kuraesin, A. D., Suryaningsih, M., Darwis, H., & Yunita, A. (2022). *The Influence of Organizational Culture on Financial Report Quality at Jakarta Water Resources Office Abstract : 2*.
- Kusumastuti, P. (2020). *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi Ke Depan*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mahmudi. (2020). *Buku Akuntansi Sektor Publik*. UII Press.
- Mardiasmo. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Mulyadi. (2020). *Akuntansi Biaya* (5th ed.). UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Nitzl, C., Roldan, J. L., & Cepeda, G. (2016). Mediation analysis in partial least squares path modelling, Helping researchers discuss more sophisticated models. *Industrial Management and Data Systems*, 116(9), 1849–1864. <https://doi.org/10.1108/IMDS-07-2015-0302>
- Ogbonnaya, A. K., & Basil C, A. (2019). Effect of Financial Reporting Quality on Financial Performance of Manufacturing Firms in Nigeria. *Research Journal of Finance and Accounting*, 10(11), 1–7. <https://doi.org/10.7176/RJFA>
- Pakpahan, Y. E. (2020). Pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap kinerja usaha umkm. *AKUNTABEL*, 17(2), 2020–2261. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL>

- Palembangan, S., Rahman Kadir, A., & Kusumawati, A. (2022). The Effect of Financial Statement Presentation and Financial Supervision on the Financial Performance of Regional Finance and Assets Agency in North Toraja Regency. *Quest Journals Journal of Research in Business and Management*, *10*(7), 38–49. www.questjournals.org
- Pratolo, S. (2008). Transparansi Dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dalam Hubungannya Dengan Perwujudan Keadilan Dan Kinerja Pemerintah Daerah: Sudut Pandang Aparatur Dan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, *9*(2), 108–124.
- Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2004). SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models. *Behavior Research Methods, Instruments, & Computers*, *36*(4), 717–731.
- Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. *Behavior Research Methods*, *40*(3), 879–891. <https://doi.org/10.3758/BRM.40.3.879>
- Putra, S. A., & Varina, R. J. (2021). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, *1*(2), 85–98. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i2.2071>
- Rahayu, S., Yudi, Y., & Rahayu, R. (2023). Local government performance: financial condition perspective. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, *10*(6), 395–408. <https://doi.org/10.22437/ppd.v10i6.11779>
- Rante, I., Salle, A., & Marlissa, E. R. (2018). Analisis Terhadap Pemberian Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, *3*(2), 1–12. <https://doi.org/10.52062/keuda.v3i2.705>
- Ridzal, N. A. (2020). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton. *FINANCIAL: Jurnal Akuntansi*, *6*(1), 87–97. <https://financial.ac.id/index.php/financial>
- Robbins, S. P., Judge, T. A., & Breward, K. E. (2022). *Essentials of Organizational Behavior Canadian Edition*.
- Safiri, E. N., & Zulkarnain, P. D. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *9*(2), 225–234. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.492>
- Safkaur, O., Afiah, N. N., Poulus, S., & Dahlan, M. (2019). the Effect of Quality Financial Reporting on Good Governance. *International Journal of Economics and Financial Issues*, *9*(3), 277–286. <https://doi.org/10.32479/ijefi.8047>
- Saputra, M. F., Hatta, M., & Salsabila, R. N. (2024). The influence of financial reporting quality and organizational culture as mediation variables on the performance of public organizations. *Proceeding of International Conference on Accounting & Finance*, *2*, 37–50.

- Savić, B., Jelić, S., & Ostojić, V. V. (2023). The Impact of Organizational Culture on Financial Performance of the Company. *Economic Themes*, 61(2), 235–248. <https://doi.org/10.2478/ethemes-2023-0012>
- Sembiring, T. B., Irmawati, Sabir, M., & Tjahyadi, I. (2023). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Prktik)* (1st ed., Issue 1). CV. SAba Jaya Publisher.
- Sohail, M., & Aziz, B. (2019). Impact Of Financial Reporting Quality On Firm's Financial Performance. *GSSJ*, 7(7). www.globalscientificjournal.com
- Subaeti, V. M. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Kualitas Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu (Studi Kasus : BPKD, Inspektorat, DPMD dan DPRD di Provinsi Bengkulu). *Jurnal Ekonomi Unihaz*, 1(2), 39–49.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Sulaksono, H. (2020). *Budaya organisasi dan kinerja*. Deepublish.
- Thi Tran, Y., Nguyen, N. P., & Nguyen, L. D. (2021). Results-oriented Culture and Organizational Performance: The Mediating Role of Financial Accountability in Public Sector Organizations in Vietnam. *International Journal of Public Administration*, 45(3), 257–272. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1841227>
- Tran, Y. T., Nguyen, N. P., & Hoang, T. C. (2021). The role of accountability in determining the relationship between financial reporting quality and the performance of public organizations: Evidence from Vietnam. *Journal of Accounting and Public Policy*, 40(1). <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2020.106801>
- Ufuoma, S., & Nwasom, R. (2023). *Influence of Culture on Financial Reporting*. 8(2), 93–110. <https://doi.org/10.56201/jpaswr.v8.no2.2023.pg93.110>
- Umaryadi, A. (2015). Opini BPK RI dan Kinerja. *Warta Pemeriksa Edisi 118*, No. XXVIII(118), 12–14. https://library.bpk.go.id/pathfinder/index.php?menu=access&identifier=jkpk_bpkpp-dl-20220329090736&read=
- Wiguna, K. Y., Syafitri, A., & Putri, R. M. (2021). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Pengadilan Agama Lubuklinggau. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi, & Bisnis*, 2(4), 106–125.
- Wina, I. P. H., & Khairani, S. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Dispenda Prov, Dispenda Kota, Dan Dishub Prov). *Jurnal Akuntansi STIE MDP*, 2(4).
- Yunia, D., & Muttaqin, G. F. (2022). The Influence of The Quality of Financial Reports on The Performance of Public Sector Organizations. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 9(2), 205–216. <https://doi.org/10.30656/jak.v9i2.4606>

- Zhao, X., Lynch, J. G., & Chen, Q. (2010). Reconsidering Baron and Kenny: Myths and truths about mediation analysis. *Journal of Consumer Research*, 37(2), 197–206. <https://doi.org/10.1086/651257>
- Zubaidah, A. N., & Nugraeni, N. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 978–988. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3475>